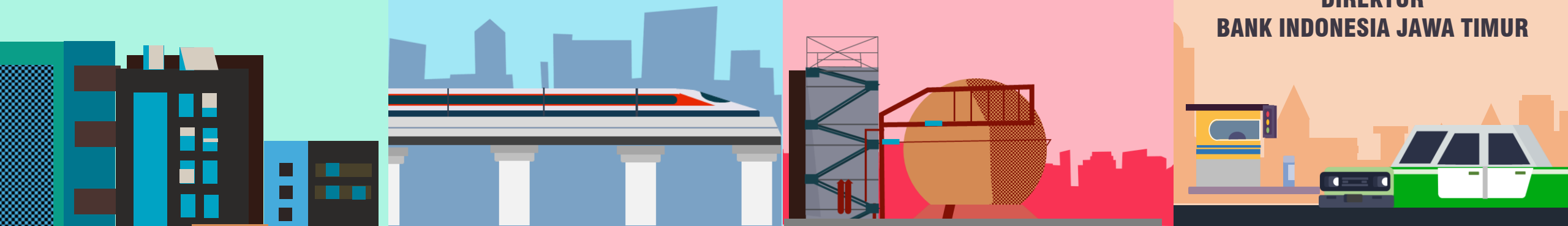


STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG KELANCARANA DISTRIBUSI ARUS BARANG DAN JASA DALAM KEGIATAN EKONOMI JAWA TIMUR

**HARMANTA
DIREKTUR
BANK INDONESIA JAWA TIMUR**



JATIM sebagai *Leading Smart Industrial Province*

Quality Growth High-Income Economy

*(>Gross National Income per Capita of US\$12,056; Indonesia 2018 = US\$3,840; Jatim 2018 = US\$3,960 (lower-middle income)

STRONG

BALANCE

INCLUSIVE

SUSTAINABLE

STABILITAS MAKRO DAN MONETER

INFLASI

PDB

CAD

KURS

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Resilensi

Intermediasi

Efisiensi

INDUSTRI AGRO & PARIWISATA

WISMAN & SPENDING WISMAN

SELINGKAR WILIS

LINTAS SELATAN

BROMO TENGGER SEMERU

INDUSTRI MANUFAKTUR

GLOBAL VALUE CHAIN

LOCAL VALUE CHAIN

GERBANGKERTOSUSILA

INDUSTRI DIGITAL

GLOBAL VALUE CHAIN

LOCAL VALUE CHAIN

KAWASAN EKONOMI KHUSUS SINGHASARI

GREEN/SOCIAL ECONOMY

Penyediaan Air Minum

School, dst

Rumah Sakit

Pengolahan Limbah

PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2019 PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

LAYANAN EKONOMI (KONEKTIVITAS: PRODUCTION-DISTRIBUTION-CONSUMPTION)



Jalan



Bandara



Pelabuhan



Kereta Api



Toll Langit

LAYANAN DASAR



PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR SUMBER PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pemerintah

APBN

SILPA; Pinjaman; Obligasi Negara

APBD

SILPA; Pinjaman; Obligasi Daerah

**KPBU (Kerjasama Pemerintah dgn Badan Usaha)/
Public-Private Partnerships (PPPs)**

Pembiayaan Swasta

Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA)

Bank Loan
Green Financing

Equity Financing
Syariah Financing

TANTANGAN

CAD melebar; ekonomi dunia melambat

Kebutuhan Infrastruktur Meningkat

Kapasitas Perbankan Terbatas

Partisipasi Swasta Rendah

Kapasitas Fiskal Terbatas

ICOR tinggi 5,07 (2018)

RISIKO

TURBULENCY

UNCERTAINTY

NOVELTY

AMBIGUITY

POLICY DIRECTION

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS

KOORDINASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

DATA & INFORMASI



Kontribusi Sektor Transportasi

6% - 12%
PDB

10% - 15%
**Pengeluaran Rumah
Tangga**

4%
**Biaya dari tiap Unit
Produk**



Dampak Transportasi



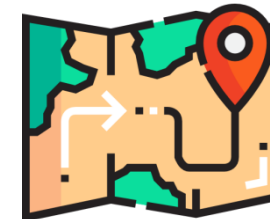
Dampak Inti

Kapasitas fisik untuk mengangkut penumpang dan barang serta biaya untuk mendukung mobilitas



Dampak Operasional

Peningkatan kinerja waktu, terutama dalam hal keandalan, serta pengurangan kehilangan atau kerusakan

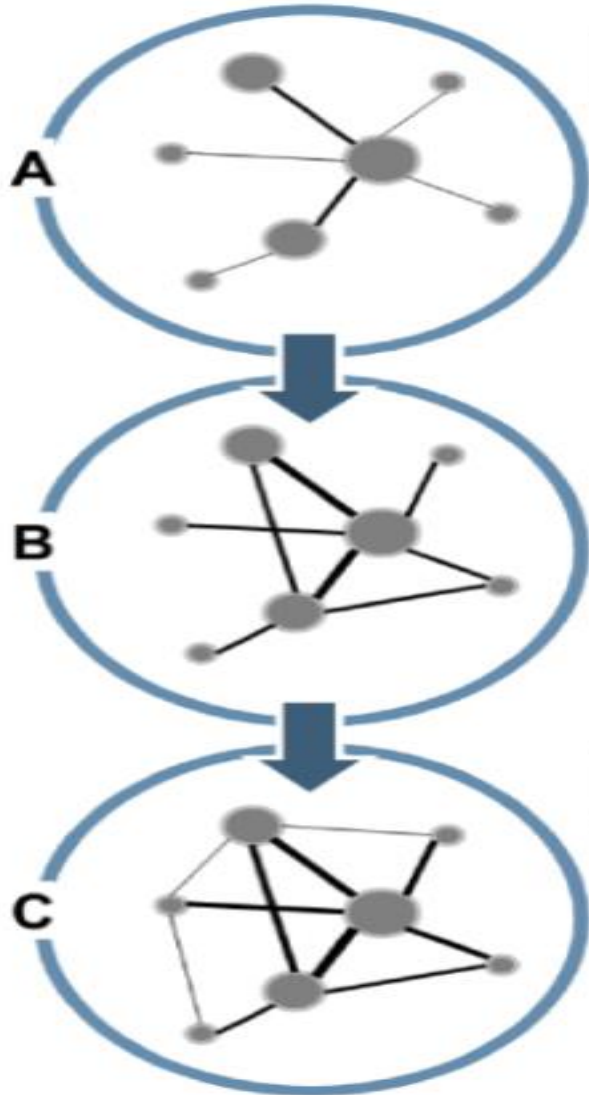


Dampak Geografis

Akses ke pasar yang lebih luas di mana skala ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi dapat ditingkatkan

	Production	Distribution	Consumption
Economies of transportation	Lower unit costs through accessibility to suppliers and customers	Lower unit distribution costs through transport chains management	Lower unit output costs through accessibility to suppliers and customers
Economies of scale	Lower unit costs with larger plants	Lower unit transport costs through larger modes and terminals	Lower unit costs with larger retail outlets
Economies of scope	Lower unit output costs with more product types	Lower transport costs with bundling of different loads	Product diversification attracts more customers
Economies of agglomeration	Industrial and service linkages with manufacturing clusters	Lower input costs with clustering of distribution activities	Lower input costs with clustering of retail activities
Economies of density	Increased accessibility to labor (skills) with higher densities	Lower unit distribution costs with higher densities	Increased accessibility to goods and services with higher densities

Main Types of Economies in Production, Distribution and Consumption



High Multiplying Effects

New infrastructure built over limited existing infrastructure. Benefits from new connectivity and capacity. New economic opportunities (labor, resources, markets).

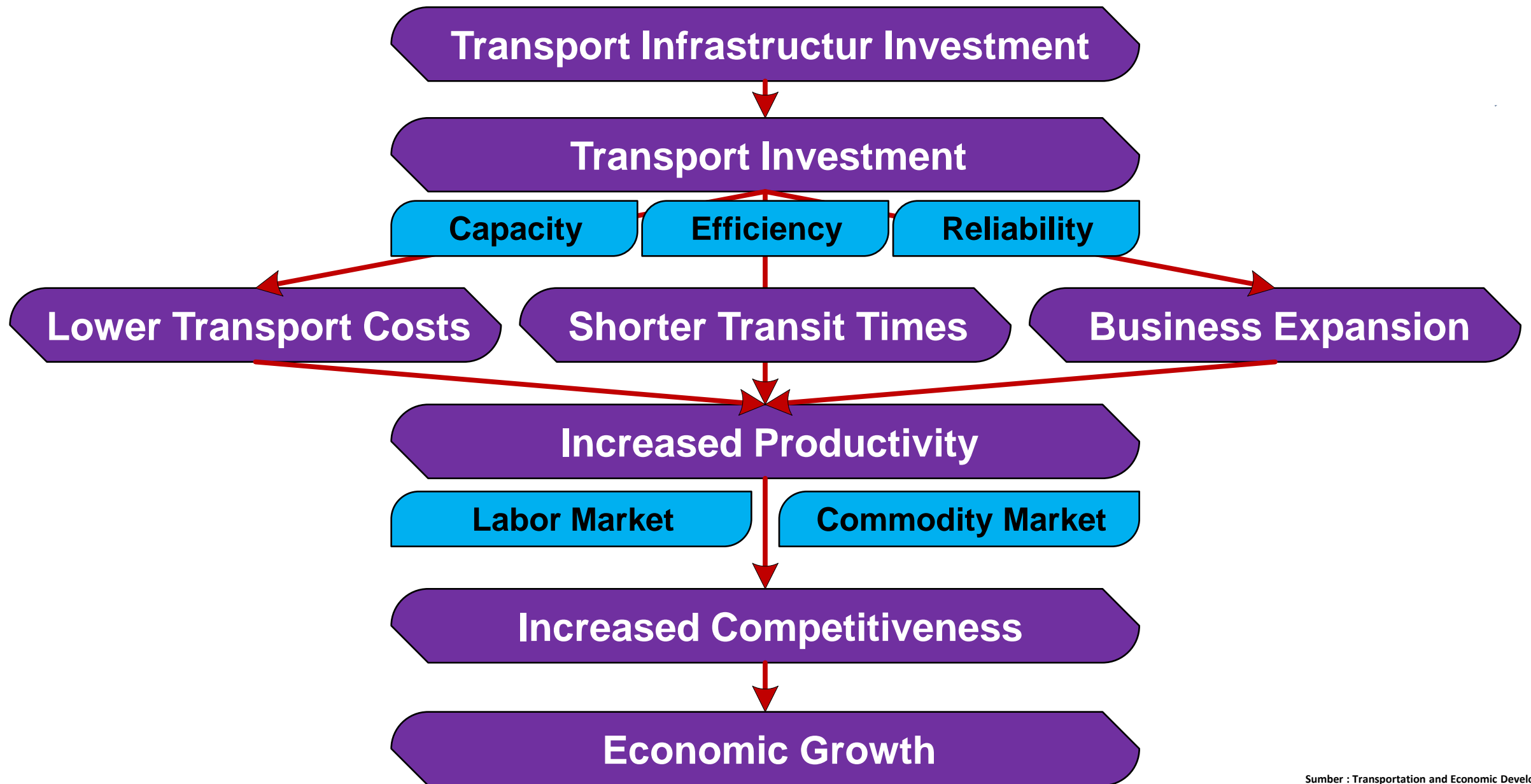
Average Multiplying Effects

Expansion of existing infrastructure; emergence of corridors. Expanded connectivity, capacity and reliability. Productivity improvements.

Low Multiplying Effects

High infrastructure maintenance and upgrade costs. Niche connectivity. Peak capacity and reliability. Limited productivity improvements.

Diminishing Returns of Transport Investments



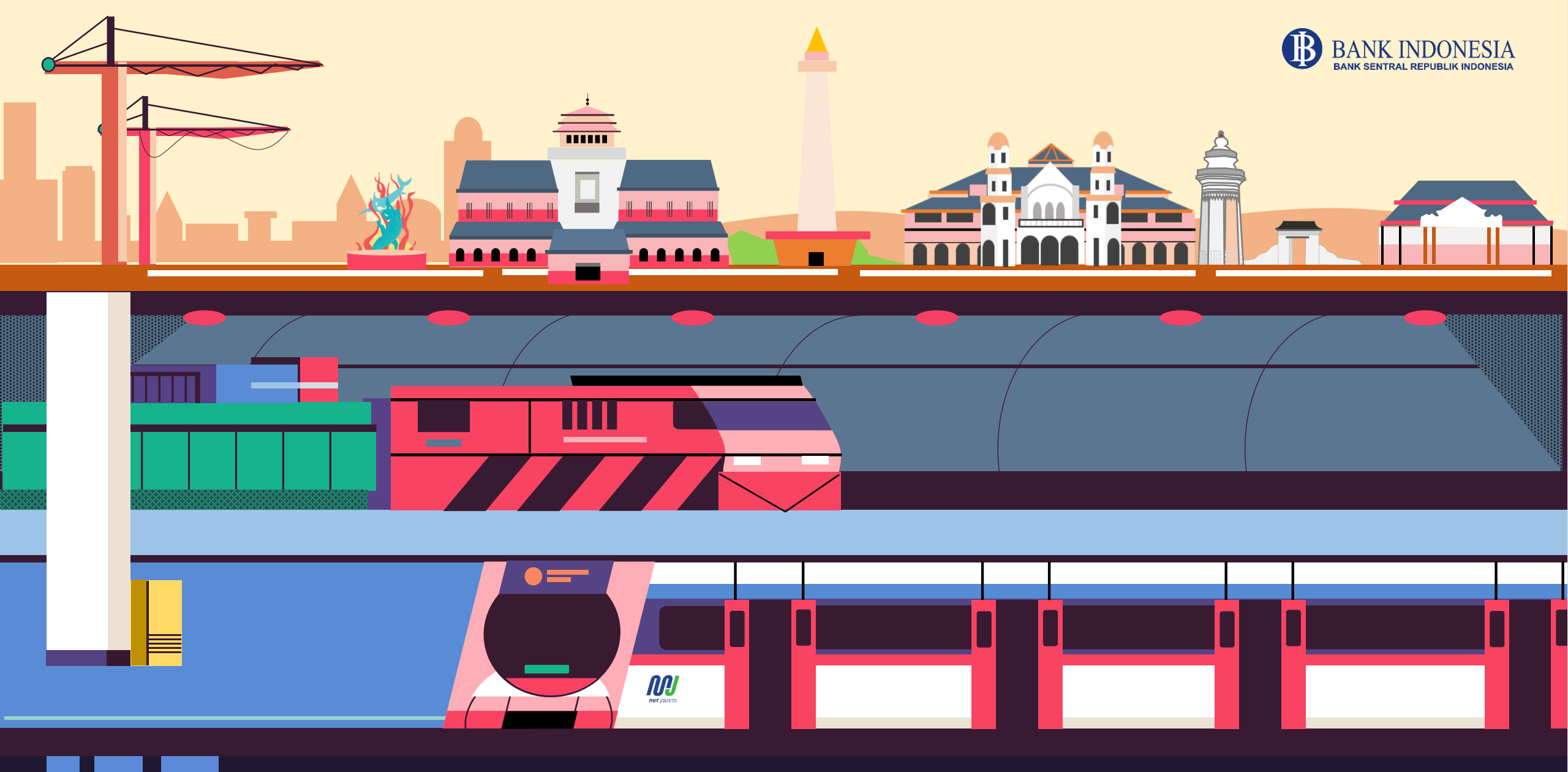
JEMBATAN SURAMADU



Pembangunan Jembatan Suramadu meningkatkan pertumbuhan kredit investasi yang signifikan di Bangkalan dan Madura.

Peningkatan tersebut mengindikasikan kenaikan investasi baik oleh investor baru maupun pelaku usaha existing untuk memenuhi potensi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pembangunan Jembatan Suramadu.

Terdapat perbedaan signifikan untuk tingkat pendapatan, pendidikan, pengalaman, pelatihan dan jam kerja di Madura pasca dibangunnya Jembatan Suramadu.

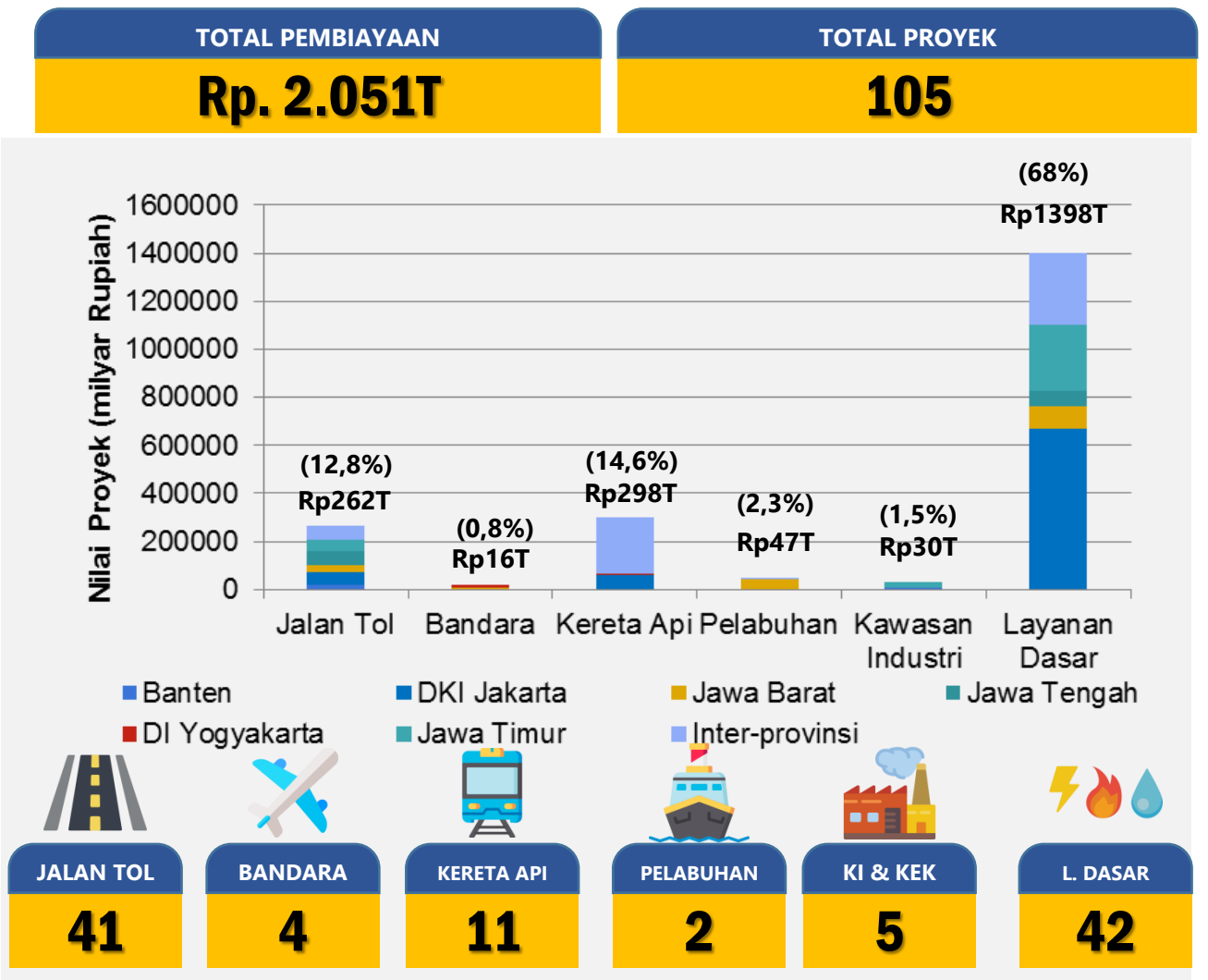
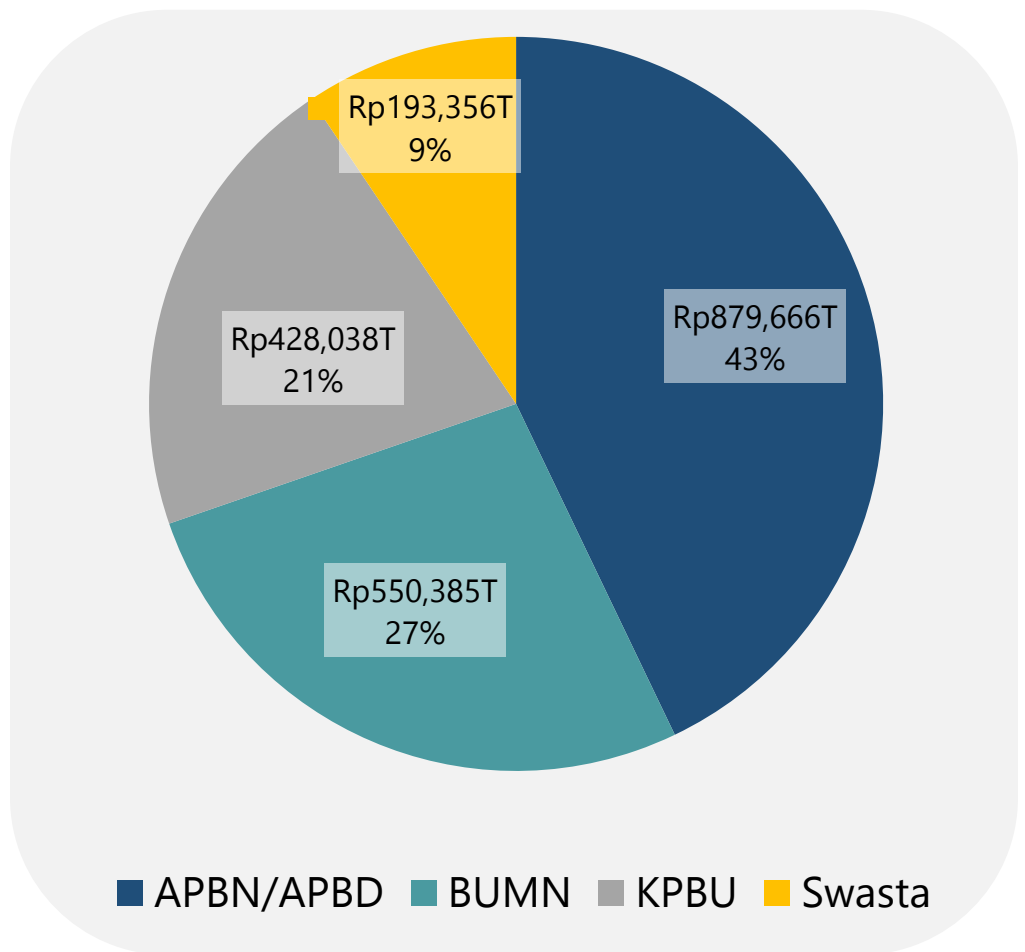


TANTANGAN & MITIGASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

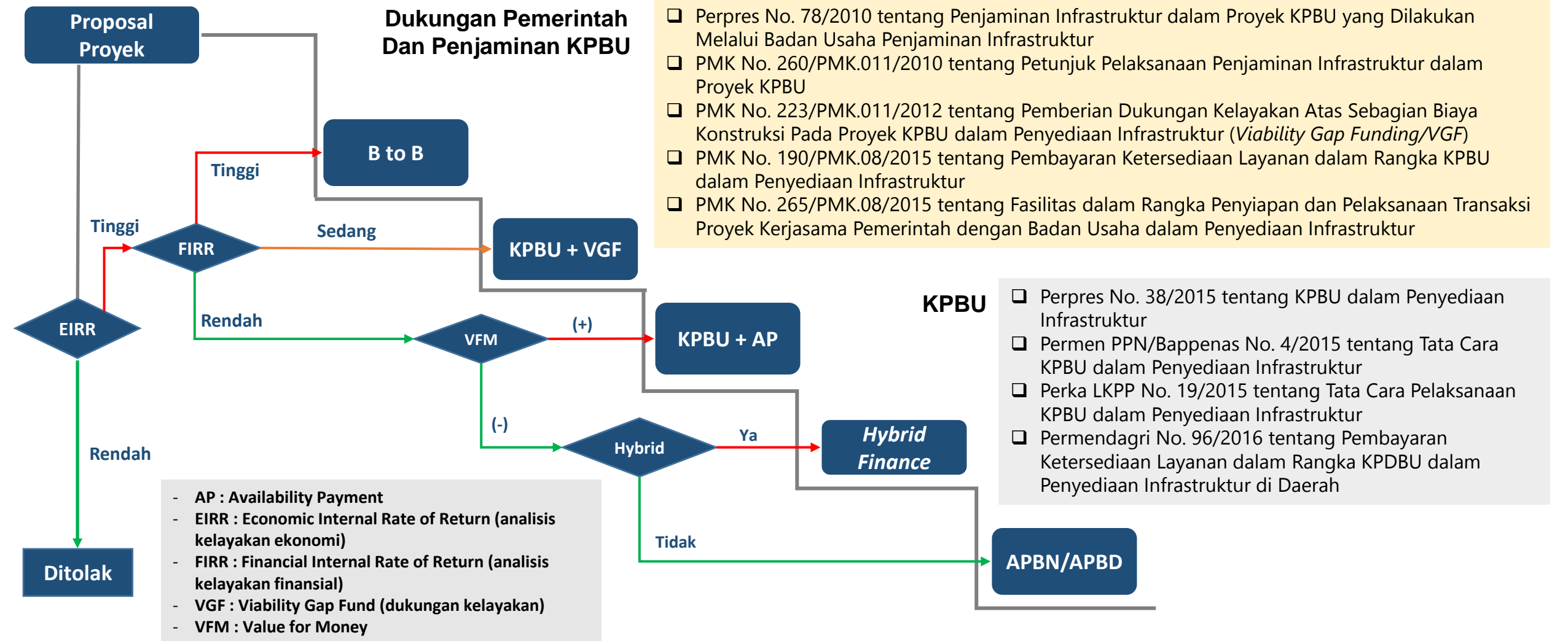
Jumlah PSN di Jawa tahun 2019 sebanyak 105 proyek. Kebutuhan dana pembiayaan infrastruktur PSN 5 tahun ke depan diperkirakan sebesar Rp2.051 triliun dan peran APBN hanya sebesar 43%. Sisanya diharapkan kontribusi dari penugasan BUMN, KPBU dan Swasta. Partisipasi terendah adalah swasta.

Pendanaan PSN Jawa



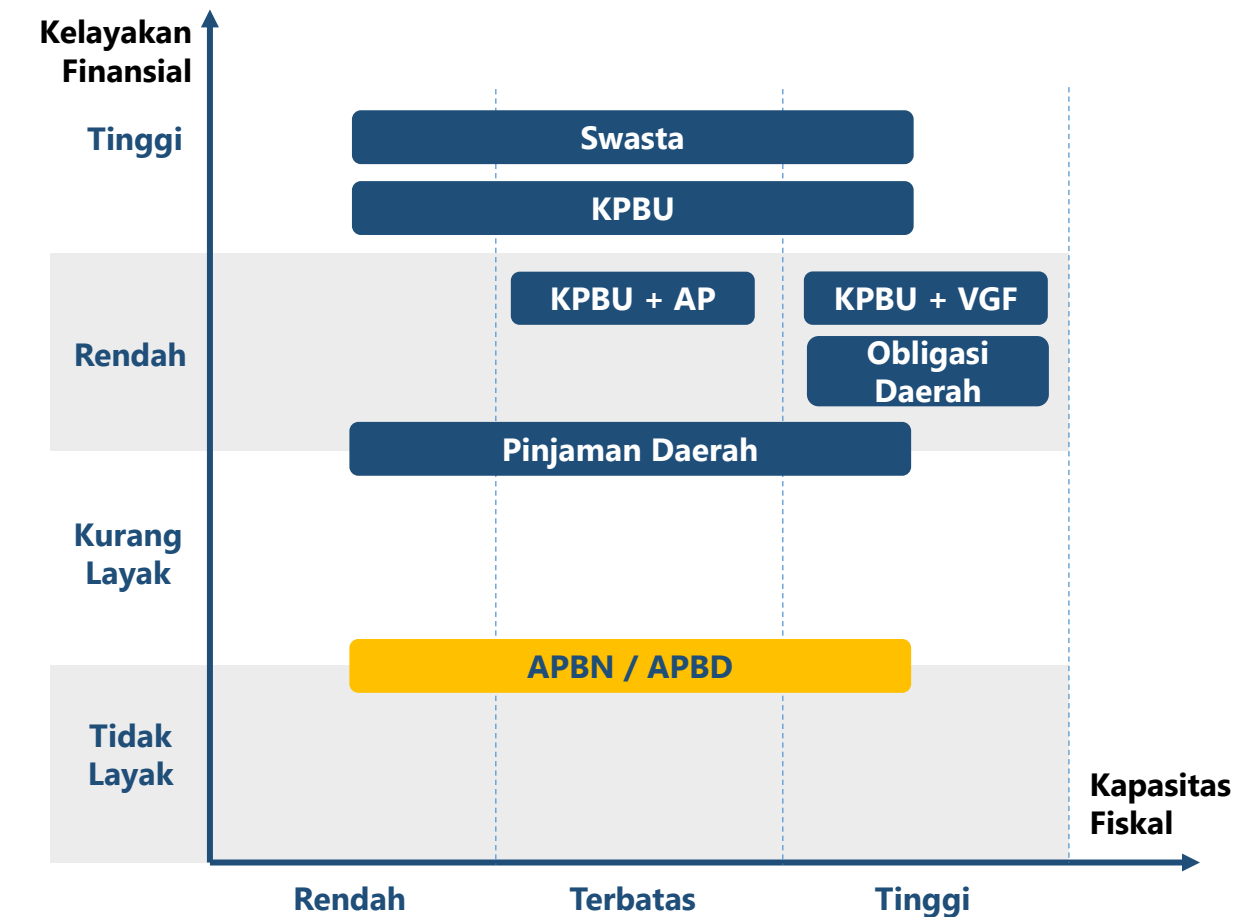
Framework Pembiayaan Infrastruktur dengan Skema KPBU

PEMDA juga dapat memanfaatkan skema KPBU dalam membangun infrastruktur. Agar swasta tertarik ikut pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU, maka FIRR (*Financial Internal Rate of Return*) proyeknya harus tinggi. Sedangkan, jika FIRRnya rendah, PEMDA dapat memberi fasilitas dukungan (seperti pemberian bantuan kelayakan proyek dalam bentuk PDF, VGF, AP, Penjaminan Infrastruktur, DTT dll), sesuai SOP dibawah ini :



Framework Pembiayaan Infrastruktur dengan Skema KPBU

Dilihat dari kelayakan finansial dan kapasitas fiskal Pemerintah, jenis-jenis alternatif pembiayaan daerah bisa dilihat sebagai berikut:

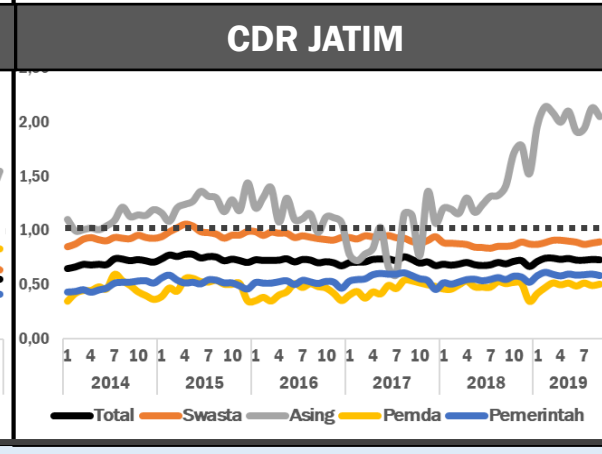
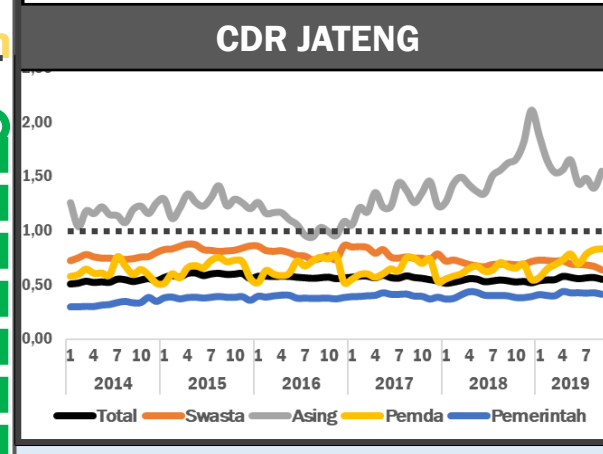
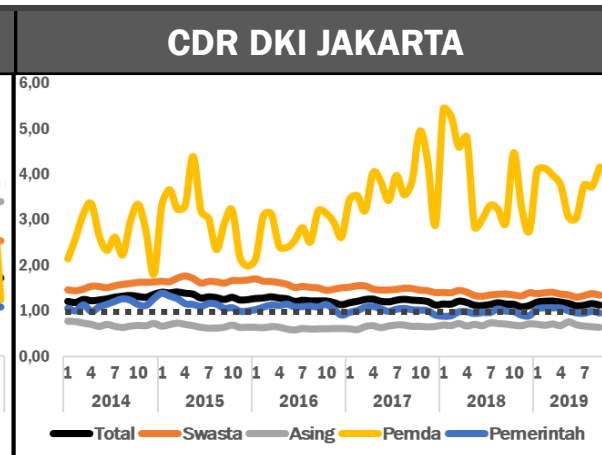
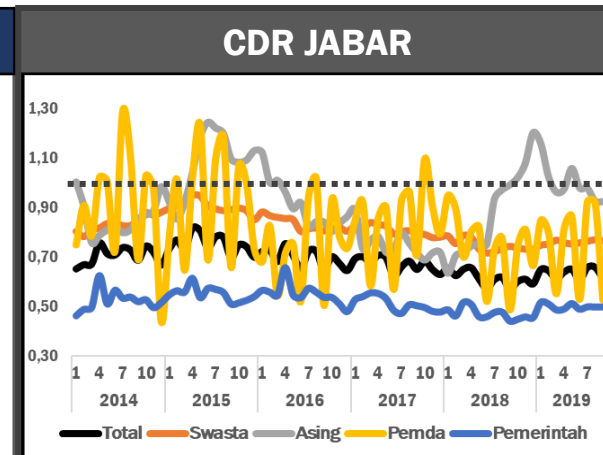
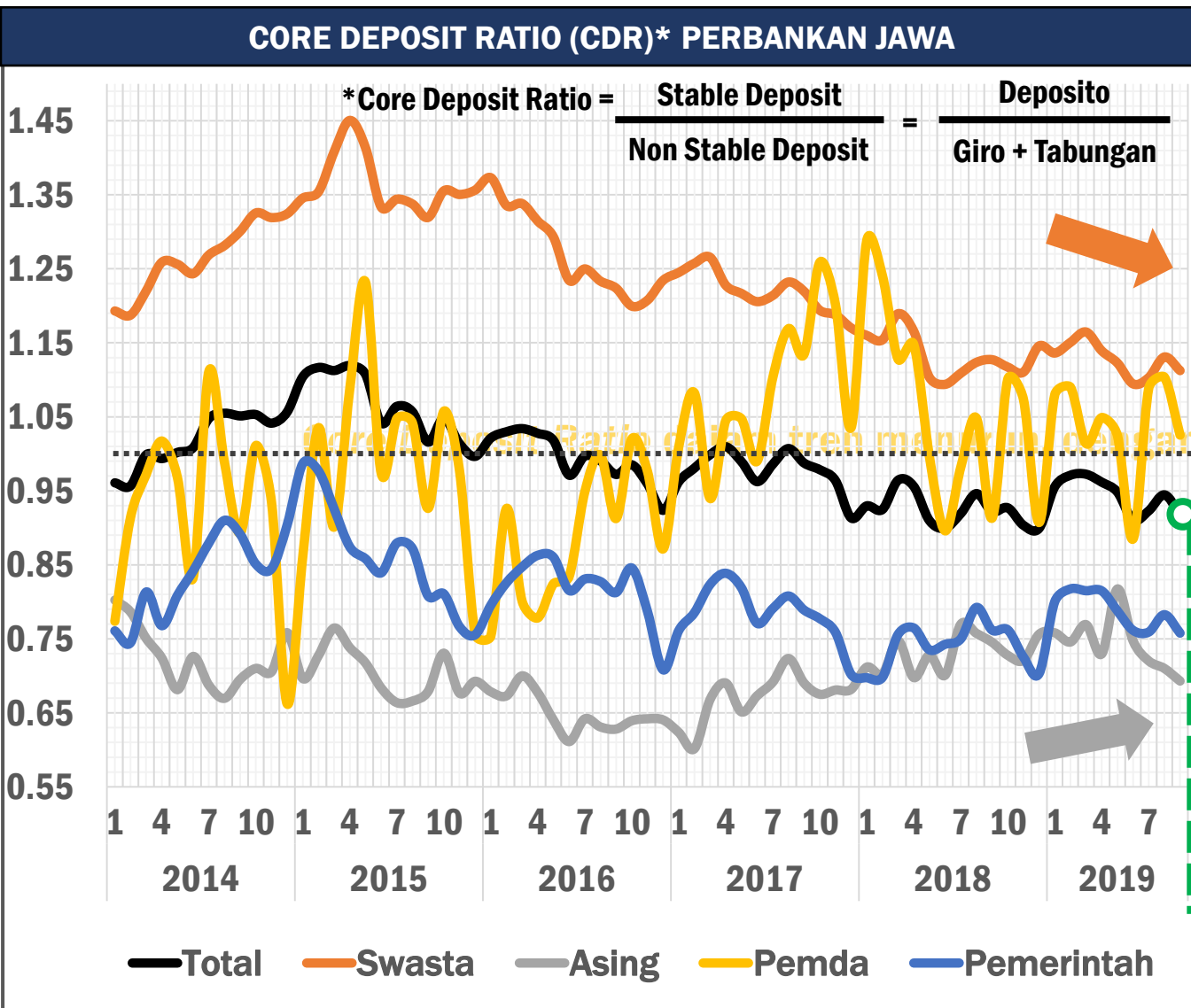


	Kelayakan Proyek	Skema Pembiayaan
Reguler	1. Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial	APBN/APBD
	2. Layak Secara Ekonomi tetapi Kurang Layak Secara Finansial	• APBN/APBD • Pinjaman Daerah
Creative Financing	3. Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal (dengan kapasitas fiskal terbatas)	• KPBU AP • Pinjaman Daerah
	4. Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal (dengan kapasitas fiskal cukup tinggi)	• KPBU dengan Dukungan VGF • Pinjaman Daerah • Obligasi Daerah
	5. Layak Secara Ekonomi dan Layak secara Finansial	• Swasta • KPBU

- AP : Availability Payment
- EIRR : Economic Internal Rate of Return (analisis kelayakan ekonomi)
- FIRR : Financial Internal Rate of Return (analisis kelayakan finansial)
- VGF : Viability Gap Fund (dukungan kelayakan)
- VFM : Value for Money

Core Deposit yang Rendah

Salah satu potensi pembiayaan infrastruktur yang cukup besar adalah bersumber dari dana perbankan (Rp4.561T Q'3-2019), namun kapasitas pembiayaan jangka menengah-panjangnya masih terbatas karena rasio *core deposit* nya relatif rendah dan cenderung menurun.

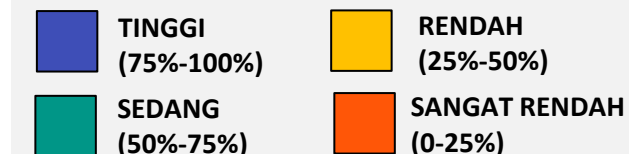
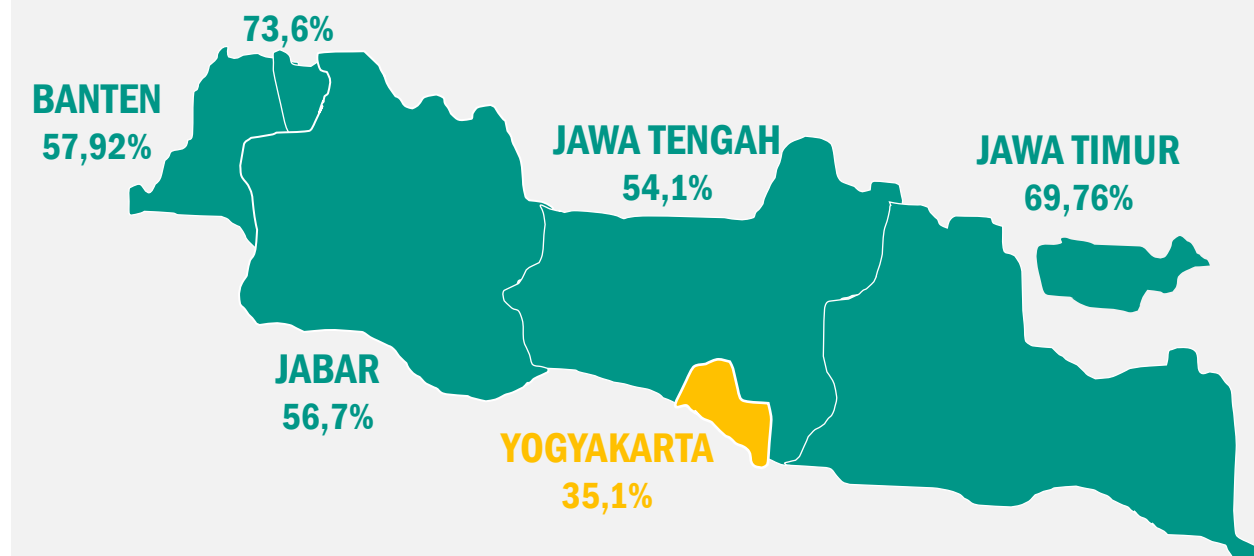


Core Deposit Ratio perbankan Jawa dalam tren menurun. Mengindikasikan peningkatan dana murah & berjangka pendek dalam komposisi DPK

ASESMEN FISKAL - DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN KAPASITAS FISKAL JAWA

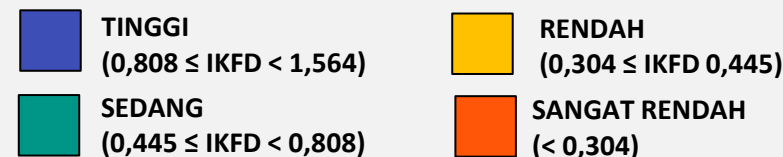
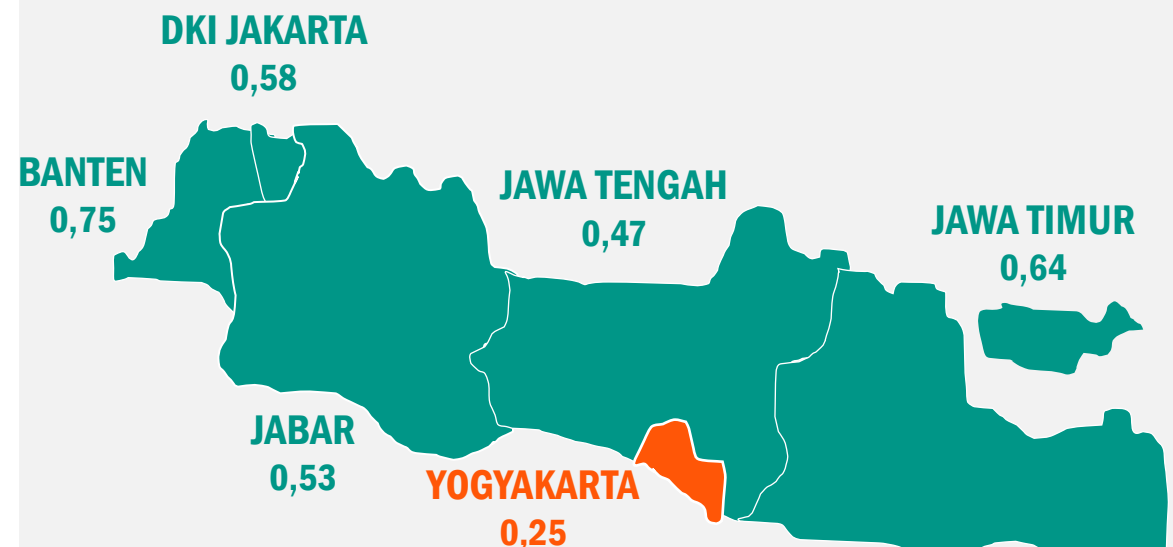
Tingkat kemandirian fiskal di Jawa rerata cukup bagus dikisaran 58%, dengan kata lain ketergantungan transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat hanya sekitar 42%. Namun, jika dilihat ruang/kemampuan fiskal, kapasitasnya relatif terbatas. Meskipun masuk kategori level “sedang” dengan nilai sekitar 0,53%, namun rasio ini belum memperhitungkan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan. Hal ini mengakibatkan PEMDA di Jawa semakin sulit untuk dapat membiayai infrastrukturnya, dan ditambah lagi dengan kendala rigiditas siklus penyusunan APBD dan panjangnya prosedur pengajuan pinjaman daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal



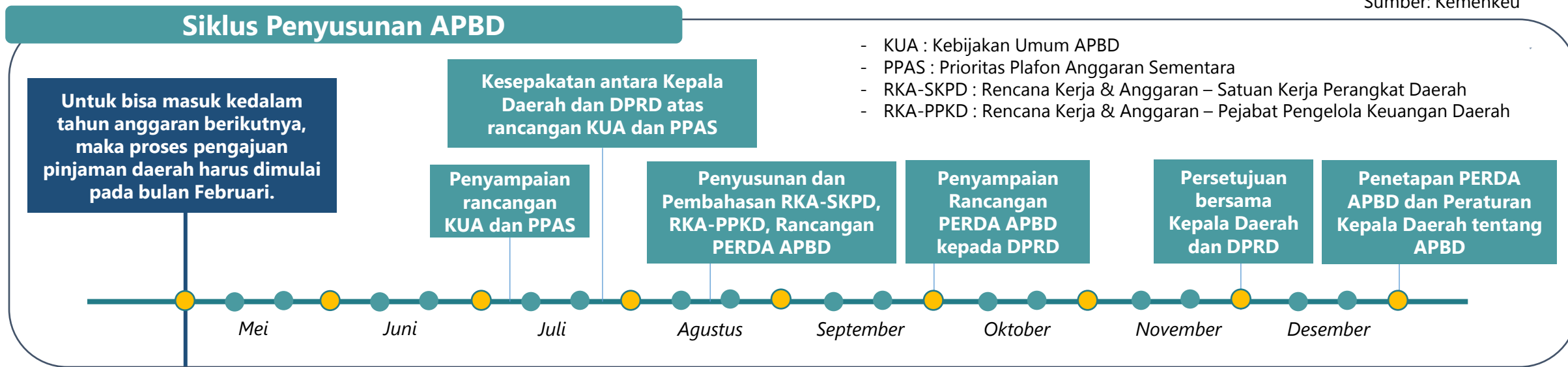
*) Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Ruang Fiskal



*) Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Sumber: Kemenkeu



Tahapan Pengajuan Pinjaman Daerah

Total 45 hari



Summary Permasalahan

1. Siklus APBD berdasarkan PP No. 56 tahun 2018 tidak memungkinkan adanya pengajuan pinjaman daerah setelah KUA dan PPAS disahkan. Rencana pinjaman daerah yang diajukan setelah periode pengesahan KUA dan PPAS harus menunggu tahun anggaran berikutnya
2. Dalam PP No. 56 tahun 2018 terkait pinjaman daerah tidak diatur harus ada rekomendasi Kemendagri, namun dalam Permendagri No. 33 Tahun 2019 diatur bahwa semua jenis pinjaman daerah harus mendapat rekomendasi Mendagri

ASESMEN FISKAL – BORROWING CAPACITY PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR

Saat ini PSN infrastruktur konektivitas di Jawa Timur belum sepenuhnya terhubung langsung ke kawasan ekonomi maupun layanan dasar, oleh karena itu kontribusi PEMDA dalam hal ini sangat diharapkan. Dari perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dibawah ini terlihat bahwa seluruh PEMDA di Jawa Timur masih memungkinkan mencari sumber pembiayaan dari pinjaman daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur, mengingat PEMDA memiliki *borrowing capacity* yang cukup memadai.

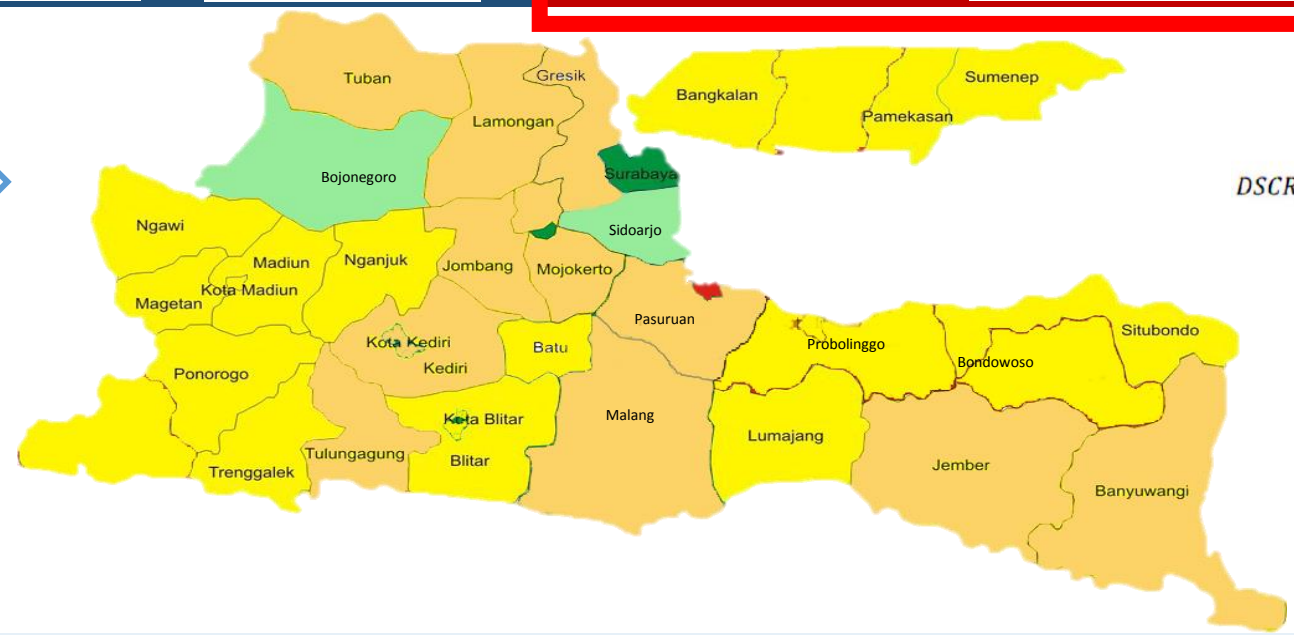


GAMBARAN *BORROWING CAPACITY* PEMDA

SELURUH PEMDA DI JATIM LAYAK



In Million Rp



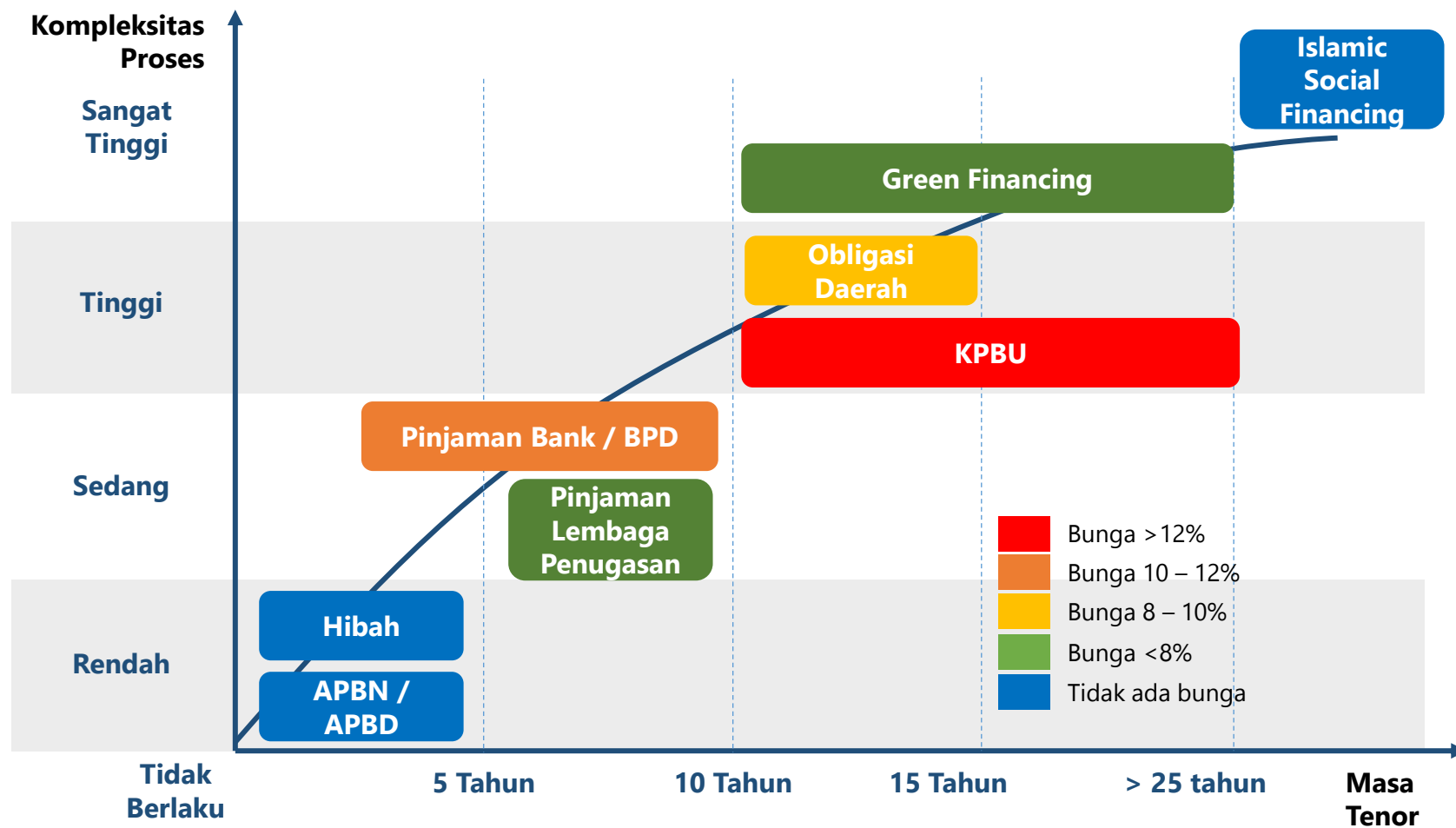
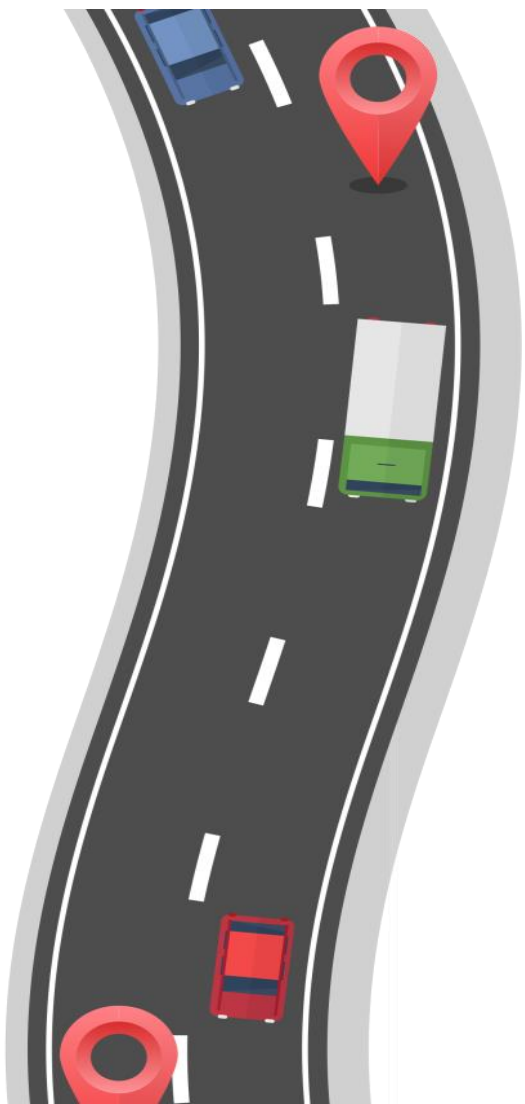
$$DSCR = \frac{PAD + DAU + (DBH - DBHDR) - BW}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + BL} \geq 2,5$$

Asumsi:

1. APBD diproyeksikan menggunakan data APBD 3 tahun terakhir (2016, 2017, dan 2018)
2. Bunga yang digunakan adalah sebesar 6,5%, sesuai dengan SBN terakhir yang dikeluarkan, namun ditambah 1%
3. Besar belanja pegawai dan biaya lain adalah 2,5% dari total pinjaman (sesuai permendagri)
4. Masa tenor pinjaman 5 tahun (dalam masa jabatan kepala daerah)
5. Besar DSCR yang digunakan adalah 2,5, yaitu jumlah minimal sesuai PP 56/2018
6. batas maksimal pinjaman daerah adalah sebesar 75% dari Penerimaan Umum APBD TA sebelumnya

Learning Curve Pembiayaan Daerah berdasarkan masa tenor, kompleksitas proses, dan tingkat suku bunga

Meskipun *borrowing capacity* cukup memadai, tidak mudah bagi PEMDA untuk mencari sumber pembiayaan infrastruktur dari pihak III. Terdapat beberapa alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan PEMDA sebagai *lessons learned*. Adapun jenis-jenis alternatif pembiayaan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan masa tenor, kompleksitas proses, dan tingkat suku bunga, adalah sebagai berikut:



PERBANDINGAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH

Lembaga	Kriteria Kesesuaian				
	Tenor	Tingkat Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar	Profil Risiko	Ketersediaan
APBN/APBD	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Lembaga Penugasan (melalui PT SMI)	5 tahun	Suku bunga SBN + 0.75%	Utang dalam Rupiah	Dijamin pemerintah	PT SMI memiliki dana yang cukup untuk jangka menengah
Obligasi Daerah	10-15 Tahun*	Sekitar 10% (AA)	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan pemerintah	Potensi besar
Pinjaman Daerah melalui BPD	<10 Tahun*	>12%*	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan pemerintah	Pagu pinjaman relatif kecil
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	10-30 Tahun	16-18%*	Pembiayaan dapat berasal dari mata uang lain	Tergantung alokasi risiko	Potensi besar dan tergantung pada ketersediaan proyek yang layak dan sesuai
Green Financing	Sesuai Kesepakatan	Lebih rendah daripada pinjaman konvensional	Pembiayaan dapat berasal dari mata uang lain	Resiko rendah	Banyak namun prosedur sangat ketat dan kompleks
Islamic Social Financing	Sesuai Kesepakatan	Tidak ada	Tidak ada	Resiko rendah	Potensi besar namun terbatas. Hanya untuk infrastruktur layanan dasar.

KESIMPULAN REKOMENDASI



PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

	Summary Permasalahan	Pemerintah	Rekomendasi
K1 KAPASITAS PEMBIAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan fiskal daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur 2. Rendahnya akses Pemerintah Daerah terhadap pasar modal / lembaga keuangan 	<p>Menyiapkan dan menyusun dokumen <i>clean and clear project</i> sebagai prasyarat pengajuan pinjaman daerah maupun obligasi daerah.</p> <p>QUICK WIN</p>	<p>Bank Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan Pinjaman Daerah untuk membiayai proyek infrastruktur daerah yang tidak masuk dalam <i>timeframe</i> perencanaan anggaran nasional. 2. Dalam menentukan prioritas skema pembiayaan, PEMDA perlu <i>lessons learned</i> tentang skema-skema pembiayaan infrastruktur baik di dalam negeri maupun di negara lain.
K2 KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siklus APBD berdasarkan PP No. 56 tahun 2018 tidak memungkinkan adanya pengajuan pinjaman daerah setelah KUA dan PPAS disahkan. Rencana pinjaman daerah yang diajukan setelah periode pengesahan KUA dan PPAS harus menunggu tahun anggaran berikutnya 2. PP No. 56 tahun 2018 mengatur bahwa pinjaman daerah tidak membutuhkan adanya rekomendasi Kemendagri. Sementara Permendagri No. 33 Tahun 2019 mengatur bahwa semua jenis pinjaman daerah harus mendapat rekomendasi Mendagri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk merancang siklus perencanaan anggaran yang dapat mengakomodasi proyek infrastruktur yang membutuhkan fleksibilitas. 2. Mengusulkan adanya simplikasi aturan/kebijakan, agar tidak terjadi timpang tindih. QUICK WIN 	-
K3 KOORDINASI & KELEMBAGAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas kelembagaan PEMDA dalam memahami proses bisnis pengajuan pinjaman daerah, obligasi daerah dan atau pinjaman dalam bentuk lain masih relatif terbatas. 2. Kurangnya tenaga ahli yang mampu merencanakan dan mengelola berbagai perjanjian dan kontrak proyek infrastruktur 	<p>Merekrut tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bisnis proses pengajuan pinjaman daerah, KPBU, obligasi daerah, green financing, sharia financing, dll</p>	<p>Bank Indonesia dan Kementerian/Lembaga Terkait secara bersama dapat melakukan <i>capacity building</i> bagi SKPD khususnya Bappeda dalam penyusunan <i>clean and clear project</i> sebagai prasyarat pengajuan pinjaman daerah maupun obligasi daerah. QUICK WIN</p>



REKDA JAWA

**TERIMA
KASIH**